

ISLAM DAN RADIKALISME

M. Sulthon

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: sulthonmuhammad99@yahoo.co.id

Pendahuluan

Radikalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik dengan kekerasan dan drastis. Sementara dalam Kamus al-Maurid dikatakan radikalitas adalah kemauan untuk mengadakan perubahan-perubahan secara ekstrem dalam pemikiran-pemikiran dan tradisi-tradisi yang umum berlaku, atau dalam situasi dan institusi-institusi yang eksis.

Dengan demikian radikalisme agama dapat dianalogkan dengan pengertian tersebut, yaitu: "paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan agama dengan cara drastis, ekstrem dan dengan kekerasan".

Belakangan ini radikalisme agama menjadi persoalan global, dianggap sebagai pemicu aksi terorisme yang mengganggu keamanan dan kedamaian di mana-mana. Radikalisme agama tidak hanya terjadi pada agama tertentu saja tetapi semua agama besar di dunia mengalaminya. Misalnya, radikalisme agama Protestan di Amerika Serikat, antara lain yang digerakkan oleh Timothy McVeigh dari Christian Identity. Radikalisme agama Islam, seperti gerakan al-Qaidah yang dipimpin Usamah bin Laden di beberapa negara, atau Boko Haram di Negeria, dan belakangan yang menghebohkan dunia munculnya ISIS yang dideklarasikan Abu Bakar al-Baghdadi di Irak Utara.

Pandangan Islam Tentang Radikalisme

Sungguh tidak mudah mengaitkan antara Islam dan ekstrimisme. Pertanyaan yang segera muncul: apakah Islam mengajarkan ekstremisme atau radikalisme? Jawaban atas pertanyaan ini selalu problematik. Sebab, agama (Islam atau agama apapun) secara *taken for granted* dipandang sebagai instrumen ilahiah yang mengajarkan hal-hal serba "baik". Bagaimana mungkin kita bisa mengkaitkan agama dengan ekstremisme sesuatu yang secara inheren dianggap mengandung hal-hal yang tidak "biasa" dan seringkali dipandang secara *pejorative*. Dalam perspektif seperti ini agama dan ekstremisme sering dilihat sebagai sesuatu yang kontradiktif.

Namun demikian, dalam kenyataan sehari-hari, kaitan erat antara agama dan ekstremisme merupakan hal yang mudah ditemui. Meskipun pada tataran penilaian banyak orang berusaha mengelak untuk mengkaitkan antara agama dan ekstremisme, realitas menunjukkan bahwa ekstremisme atau radikalisme keagamaan itu sering dijumpai.

Perlu ditambahkan, bahwa pada dasarnya ada keengganan bagi banyak kalangan umat beragama untuk melihat potensi antara agama dan ekstremisme. Sikap enggan ini bukan didasarkan semat-mata

untuk membela agama tertentu tetapi karena fungsi agama memang bukan untuk mendorong tindakan-tindakan yang bersifat ekstrem, radikal, dan berbau negatif. Agama selalu berbicara tentang hal-hal yang baik, serba agung, untuk menciptakan tatanan yang dalam perspektif, misalnya Islam *"Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur"*. Masyarakat Jawa menyebutnya *"Negeri gemah ripah lohjinawi, toto tentrem kerto raharjo"*, atau dalam pandangan para sosiolog barat, agama dimaksudkan untuk menciptakan *"the good society"*. Inilah kira-kira yang menjadi fungsi universal agama-agama yang ada.

Meskipun begitu, terlepas dari paparan di atas, siapapun pada dasarnya sulit untuk mengingkari adanya tindakan-tindakan ekstrem yang setidaknya membawa bendera-bendera agama kalau bukan justru diinspirasi dan dimotivasi oleh cara pandang serta pemahaman tertentu terhadap doktrin-doktrin agama. Dan, dalam konteks perkembangan global dewasa ini, komunitas Islam sulit untuk menghindar dari pertanyaan apakah Islam mendakwahkan ekstremisme? Tentu dengan semangat subyektifitas keagamaan, setiap muslim akan menjawab dengan nada negatif. Dengan kata lain, Islam tidak pernah mengajarkan ekstremisme. Kendatipun mereka mengetahui bahwa ada banyak tindakan ekstrem yang bisa dikaitkan dengan Islam². (jangan lupa, hal yang sama juga bisa dikenakan terhadap agama-agama lain), setidaknya-tidaknya mereka akan mengatakan tidak ada doktrin dan prinsip Islam yang menganjurkan ekstremisme.

Menurut Yusuf Qardhawi, prinsip-prinsip Islam dibangun atas moderasi dan keseimbangan. Hal ini termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sumber yang pertama telah menyebutkan berbagai istilah yang memerintahkan muslim untuk selalu berada di tengah, menjadi moderat dan berlaku seimbang (*wasath*) serta melarang mereka berlaku ekstrem (*Ghuluw/berlebihan*), *ta'addi (melampaui batas)*, atau *tasydid* (kaku, keras). Demikian pula, berkali-kali Nabi Muhammad mengingatkan Umatnya agar tidak berlebihan meskipun di dalam menjalankan ajaran agama.

Ada tiga problem agama dalam ekstremisme agama menurut Yusuf Qardhawi, *pertama*, tindakan ekstrem atau melampaui batas itu terlalu sulit untuk dapat disetujui oleh manusia biasa. Terlalu berat bagi mereka untuk memikul beban atau mentolerir tindakan-tindakan yang melampaui batas. Meskipun mungkin ada sebagian orang yang dapat hidup dengan praktik-praktik yang melampaui batas, mayoritas tidak mungkin bertindak demikian. Karenanya dapat dikatakan bahwa ekstremisme itu sebenarnya berlawanan dengan sifat manusia (*human nature*).

Kedua, tindakan ekstri atau yang melampaui batas itu tidak berumur panjang (*short-lived*). Secara alamiah, kemampuan orang untuk bertahan khususnya terhadap hal-hal yang berbau ekseksif itu terbatas. Dan karena manusia itu pada dasarnya cepat bosan, maka ia tidak bakal mampu bertahan dengan tindakan-tindakan yang melampaui batas untuk jangka waktu lama.

² Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama*, iman dan politik dalam masyarakat modern. Jakarta : erlangga, 2003, h. 33.

Ketiga, praktik-praktik yang melampaui batas itu membahayakan dan melanggar hak dan kewajiban pihak lain.

Untuk menanggulangi radikalisme atau ekstremisme perlu dicarikan solusi yang antara lain melalui sikap menghargai, terhadap pluralisme keagamaan dan melalui pendidikan.

Merumuskan Tata Hubungan Antar Umat

Dalam konteks pluralisme, kehadiran agama dapat dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai—dalam bahasa ekonomi— *comparative advantage*. Ia memberi nilai tambah terhadap—dan secara teoretis mempermudah—upaya menciptakan keseimbangan antara kehidupan material dan immaterial; profan dan sakral. Tapi, yang demikian itu tidak bisa diperlakukan secara *taken for granted*. Alih-alih, keinginan, harapan atau “imajinasi” seperti itu harus diupayakan melalui kiat-kiat sosial-budaya, ekonomi dan juga politik yang memungkinkan (*socio-cultural, economic and political crafting*).

Sejarah sosial dan politik Indonesia kaya akan bukti dari pernyataan teoretis di atas. Skisme keagamaan dan sejarah antagonisme yang getir antara kalangan santri dan abangan yang berkembang di zaman Mataram merupakan bukti konkret dalam hal ini.³ Menurutny, “dalam perjuangannya melawan Mataram, para penguasa di pesisir mendakwahkan Islam yang lebih murni sebagai standar seruan mereka, terutama ketika melawan Sultan Agung (1613-1646) dan penerus-penerusnya. Para guru agama berkeliling dari satu desa ke desa lain di Jawa Tengah, menyerukan perlawanan terhadap Sultan. Sebaliknya, para penguasa Mataram menyerukan kemegahan Majapahit dan, dalam banyak kesempatan, mengejar-ngejar, bahkan membunuh, para guru muslim ortodoks di tingkat lokal. Pertempuran itu berlangsung lama dan sengit, dan dilaporkan hampir-hampir menghabiskan penduduk di banyak wilayah di Jawa Timur.”⁴

Demikian pula yang terjadi dengan diskusi panjang di antara para pendiri republik di BPUPKI dan PPKI, yang kemudian diteruskan oleh para pelaku sosial-ekonomi dan politik Indonesia kontemporer sampai sekarang ini. Kesemuanya itu, merupakan *encounters* ideologis dan politis antara berbagai praktisi agama yang menegaskan perlunya kiat-kiat tertentu dibangun guna merealisasikan makna penting agama dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Bahkan, seandainya agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak diperlukan pun, kiat-kiat teologis maupun politis tetap harus dirumuskan. Sebab, pluralisme tanpa adanya seperangkat nilai dan aturan yang menemaninya akan menciptakan ketegangan-ketegangan, dan—seperti yang ditunjukkan oleh sejarah Mataram—bisa menjadi sangat pahit.

³ Lihat, Robert R. Jay, “*Santri and Abangan: Religious Schism in Rural Central Java*”, Harvard University, 1957. Lihat juga tulisannya “*History and Personal Experience: Religious and Political Conflict in Java*”, dalam Robert F. Spencer (ed), *Religion and Change in Contemporary Asia*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971.

⁴ Robert Jay, *Religion and politics in rural central java, nex haven : southeast asia studies*, Yale University, 1963, h. 10

Kenyataan seperti ini tak dapat dielakkan begitu saja, karena antara lain sifat *Janus-faced* (“dua muka”) yang melekat pada agama. Pada satu sisi, agama mempunyai nilai-nilai yang bersifat inklusif, universal, dan *transcending*. Tetapi, di sisi yang lain, agama mengandung hal-hal yang bersifat eksklusif, partikular, dan primordial.⁵ Ketidaktepatan apalagi kesemena-menaan dalam memperlakukan “dua muka” agama ini dapat menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam banyak hal, antagonisme antar berbagai komunitas agama di Indonesia muncul karena masalah ketidaktepatan atau kesemena-menaan itu.⁶

Kenyataan ini sebenarnya disadari betul para pendiri republik. Sampai tahap-tahap tertentu, perdebatan antara Mohammad Natsir dan Soekarno tentang masalah kebangsaan merupakan upaya awal untuk sampai pada kiat-kiat pengaturan pluralisme keagamaan yang memungkinkan. Demikian pula yang terjadi dengan diskusi panjang antara “golongan agama” dan “golongan nasionalis” di BPUPKI dan PPKI—sesuatu yang dilanjutkan pada Sidang Konstituante. Nuansa absolutisme—ironisnya merupakan sesuatu yang bertentangan dengan pluralisme itu sendiri— dan *interplay* politik antara Presiden Soekarno dan tentara mengandaskan usaha-usaha penciptaan kiat-kiat yang diperlukan.

Harus diakui, bahwa sampai sekarang sebenarnya kita belum mempunyai kiat-kiat pengaturan kehidupan pluralisme keagamaan seperti yang dimaksudkan di atas. Mungkin saja benar, seperti sering dikemukakan orang, bahwa pada tataran ideologis dasar-dasar bagi perumusan kiat-kiat pengaturan hubungan antarkomunitas agama yang sangat pluralistis itu, telah ada. Dalam hal ini, orang sering membicarakan Pancasila sebagai *common platform*, sebagai *kalimatun sawa*’ bagi kehidupan sosial-ekonomi dan politik bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang keagamaan yang beragam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan sebagai dasar kerukunan kehidupan beragama.⁷ Tetapi, dalam kerangka yang lebih *deliberate* dan lebih spesifik, penjabaran dari *common platform* atau *kalimatun sawa* itu belum ada.

Dalam konteks politis dan ideologis, hal ini bisa dibaca dalam semangat perdebatan yang kental nuansa absolutismenya antar berbagai kalangan agama, terutama dalam upaya mereka menetapkan dasar negara pada Sidang Konstituante. Lihat, Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

⁵ Jose Casanova, *Public Religions In The Modern World*, Chicago and London : The University of Chicago Press, 1994, h. 4.

⁶ Dalam konteks politis dan ideologis, hal ini bisa dibaca dalam semangat perdebatan yang kental nuansa absolutismenya antar berbagai kalangan agama, terutama dalam upaya mereka menetapkan dasar negara pada sidang konstituante. Lihat Adam Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia : A Socio-Legal Study of The Indonesian Konstituante 1956-1959*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.

⁷ Lihat, antara lain, M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996, h. 102-105.

Pernyataan terakhir ini dibuat bukan untuk mengatakan bahwa upaya-upaya ke arah itu tidak ada. Pada tingkat undang-undang, satu dua kiat yang berupa *legal arrangement* telah tersedia. Pada tahun-tahun awal Orde Baru, dialog-dialog antartokoh agama untuk mengatur masalah penyebaran agama, pendirian rumah-rumah ibadah, pendidikan agama, dan sebagainya, mengalami jalan buntu. Meskipun yang sedemikian itu sedikit banyak kini telah tersedia, pada kenyataannya tidak semua komunitas agama bisa menerima dengan sepenuh hati. Karenanya, aspek legal-binding dari kiat-kiat perundang-undangan itu pada dasarnya tidak berjalan secara efektif. Akibatnya, pluralisme agama tetap menjadi suatu persoalan.

Penilaian singkat mengenai kiat-kiat legal ini bukan untuk mengatakan bahwa persoalan pluralisme keagamaan secara otomatis akan terselesaikan jika kita mempunyai seperangkat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat agama yang beragam itu. Tetapi, hal itu hendaknya dilihat sebagai prasyarat minimal untuk menuju ke arah yang lebih bersifat penyadaran dan permanen, yaitu kesadaran masyarakat agama tentang pluralitas yang dimilikinya.

Ini berarti kita berbicara soal penyadaran (*conscientization*). Sesuatu yang jauh lebih sulit diciptakan, daripada sekadar merumuskan serangkaian *legal Grafting*. Di situ yang dituju adalah kesadaran manusia bahwa ia tidak sendirian, melainkan hidup di tengah kerumunan orang dengan latar belakang sosial-budaya dan keagamaan yang berbeda. Fakta yang tak dapat dielakkan ini hanya akan bisa berperan sebagai sesuatu yang positif hanya jika dikelola dengan baik, meskipun tidak harus menghilangkan subjektivitas masing-masing pihak.

Sektor Pendidikan Sebagai Harapan

Dalam kerangka persoalan yang dikemukakan diatas, adalah suatu kewajiban jika orang kemudian menoleh ke bidang-bidang lain sebagai langkah diversifikatif untuk menemukan kiat-kiat yang dimaksud. Untuk hal yang seperti ini, bidang pendidikan apalagi yang berkaitan dengan agama dianggap sebagai infrastruktur yang memungkinkan. Ini karena pendidikan seringkali dipandang sebagai instrumen perubahan, khususnya yang berkaitan dengan nilai dan sikap mental. Pendidikan masih dinilai sebagai infrastruktur paling memungkinkan untuk proses transformasi nilai. Kesadaran terhadap pentingnya kemerdekaan yang tumbuh di kalangan elite nasional pada awal dasawarsa 1920-an muncul, antara lain, berkat pendidikan.⁸

Kecuali itu, dalam konteks Indonesia, pendidikan tentu bukan hanya dalam pengertian sekolah mempunyai dasar-dasar ideologis yang kuat, untuk mencapai Indonesia yang dicita-citakan. Dengan itulah, yang dimaksud poin-poin penting yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sesuatu yang oleh banyak pihak sering dianggap lebih "bermakna" daripada batang tubuhnya sendiri. Poin penting dalam hal ini adalah salah satu tujuan utama berdirinya Republik yang dirumuskan dengan kata-kata "...-

⁸ Lihat, misalnya, buku Robert Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, The Hague : W. Van Hoeve, Ltd. 1960

mencerdaskan kehidupan bangsa ...⁹. Tujuan seperti ini jelas menunjukkan betapa pentingnya soal pendidikan— persoalan yang lagi-lagi harus dibedakan dengan sekadar pengajaran.

Barangkali, karena adanya penekanan ideologis seperti ini, bukan suatu kebetulan kalau Indonesia sejak awal kemerdekaan membuka pintu lebar-lebar atas dunia pendidikan. Meskipun dihadapkan pada kendala finansial dan fisik yang luar biasa besarnya, pemerintah melepaskan dunia pendidikan dari struktur (kelas) sosial yang membelenggu. Kalau pada masa kolonial hanya kalangan dengan struktur kelas sosial-ekonomi tertentu yang dapat menikmati pendidikan, maka pada masa kemerdekaan, khususnya setelah masa revolusi, dunia pendidikan dilepaskan dari hambatan kelas tadi. Pendidikan menjadi lebih bersifat egaliter.

Dalam perjalanannya selama empat dasawarsa lebih, pendidikan telah memberikan sumbangan yang luar biasa besarnya dalam proses transformasi masyarakat Indonesia, dari tradisional ke modernis, dari agraris ke industrialis, bahkan ke gerbang warga bangsa yang mempunyai kesadaran *high-tech*. Inilah proses panjang yang oleh Karl Deutsch atau Daniel Lerner disebut mobilisasi sosial.¹⁰ Dalam konteks komunitas Islam, tidak terlalu berlebihan jika Nurcholish Madjid melihat kenyataan ini sebagai “ledakan intelektual”.¹¹

Poin penting yang dapat diambil dari pernyataan singkat di atas adalah demikian kuatnya kaitan antara pendidikan dan transformasi masyarakat Indonesia, paling tidak dari sudut pandang meningkatnya kalangan terdidik dan/atau berbudaya metropolitan. Kalau pada masa awal kemerdekaan hanya kalangan tertentu yang dapat dinisbatkan pada golongan seperti itu atau yang oleh Mildred Geertz disebut memiliki subkultur metropolitan,¹² terutama mereka yang berlatar belakang Partai Sosialis Indonesia maka lapisan sosial seperti itu cenderung membesar empat dasawarsa kemudian.

Demikian pulakah halnya kaitan antara pendidikan dengan transformasi masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan penghargaan atas realitas keagamaan yang pluralistis itu? Saya khawatir, jawaban atas pertanyaan seperti ini tidak *cliar cut* benar, baik bersifat afirmatif atau negatif. Kesulitan untuk memberikan jawaban yang pasti terletak pada watak *recurrent* dari problematika yang berkaitan dengan soal pluralisme keagamaan. Pada suatu tempo, fenomena pluralisme keagamaan menunjukkan tahapan-tahapan yang menggembirakan. Pada kesempatan lain, yang justru muncul ialah antagonisme teologis dan politis yang berkepanjangan. Kaitannya dengan itu, hampir-hampir pendidikan tidak

⁹ *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, h. 420.

¹⁰ Lihat “*Sosial Mobilization and Political Development*”; Daniel Lerner, *The Passing of Traditional Society in the Middle East*.

¹¹ Lihat, Syafii Anwar, “*Islam, Negara, dan Formasi Sosial dalam Orde Baru : Menguk Dimensi Sosio-Historis Kelahiran dan Perkembangan ICMI*”, *Ulumul Qur’an*, no. 3, vol. III, suplemen, 1992.

¹² Lihat, Mildred Geertz, “*Indonesian Cultures and Communities*”, dalam Ruth McVey (ed), *Indonesia, New Haven : Southeast Asia Studies, Yale University, 1963*.

menunjukkan dirinya sebagai faktor yang ikut menentukan baik-buruknya perkembangan kehidupan pluralisme keagamaan. Dengan kata lain, baik-buruknya perkembangan kehidupan pluralisme keagamaan ditentukan oleh hal-hal di luar dunia pendidikan dalam hal ini yang justru tampak, khususnya, pada masa Orde Baru, adalah faktor politik. Yaitu sejauh mana negara mampu berperan sebagai *buffer zone* untuk menciptakan kenyamanan dalam beragama di satu pihak, dan menghindari konflik keagamaan di pihak lain.

Dalam konteks ini bisa dipahami, mengapa pemerintah masih bisa membanggakan keharmonisan keagamaan masyarakat Indonesia kepada dunia luar. Dan dewasa ini masyarakat meratapi betapa rapuhnya sesungguhnya dasar-dasar keharmonisan kehidupan keagamaan kita. Atas dasar itu, kita dapat mengajukan pertanyaan, mengapa keterkaitan antara pendidikan dengan penghargaan atas pluralisme agama tidak sekuat keterkaitan antara pendidikan dengan transformasi sosial masyarakat?¹³ Jawaban pintas dari pertanyaan di atas, adalah kenyataan bahwa pendidikan telah direduksi menjadi sekadar pengajaran. Di sini yang lebih menonjol adalah hal-hal yang bersifat kognitif, penguasaan terhadap subjek akademik, dan bukan pengembangan watak anak didik tentang bagaimana bersikap terhadap realitas lingkungan yang secara keagamaan bersifat pluralistik.¹⁴

Karenanya, meskipun banyak lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan ilmu perbandingan agama, itu hanya sampai pada pemahaman kognitif atas masing-masing agama. Dalam konteks itulah, anak didik mengetahui, konsep ketuhanan dalam masing-masing agama, dengan seluruh implikasi keberagamannya (monoteistis, trinitas, trimurti, atau bahkan dalam tataran etis). Tetapi, mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap di luar disiplin akademik tadi. Padahal, kehidupan mereka lebih banyak dibentuk dan dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan mereka sendiri yang secara teologis mempunyai watak-watak eksklusif, partikular, dan primordial. Dalam kerangka ini, infrastruktur pendidikan yang ada secara teologis dan akademik tidak begitu relevan dengan penciptaan kesadaran anak didik tentang pluralisme keagamaan.

Bahkan, tak jarang dunia pendidikan justru menyumbangkan persoalan-persoalan yang dapat memperuncing kerukunan kehidupan antarumat beragama.

¹³ Meskipun dengan pernyataan ini saya tidak ingin membuat suatu generalisasi penilaian bahwa seluruh konflik yang berbau agama semata-mata disebabkan oleh persoalan agama. Tentu di sana-sini ada faktor sosial-ekonomi dan politik yang bermain. Akan tetapi, menempelkan persoalan tersebut sebagai satu-satunya *scapegoat* (kambing hitam) dalam konflik, sama saja dengan membuang kemungkinan sentimen keagamaan ikut bermain dalam persoalan ini. Hanya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu saja, sebagian dari kita sering kali berusaha menutup-nutupi potensi agama dalam memicu konflik. Padahal "wajah" agama yang memancarkan ciri-ciri eksklusif, partikular, dan primordial mempunyai kekuatan untuk berlaku demikian. Tentu, jika hal ini tidak dikelola atau dengan bijaksana.

¹⁴ Lihat sejumlah artikel di Prisma edisi "Mencari Kiblat Pendidikan", no. 7, Juli 1980. Lihat juga M. Dawam Rahiardo (ed.), *Keluar dari Keinelut Pendidikan Nasional: menjawab Tautangan Kualitas Sumberdaya Manusia Abad 21*, Jakarta: Intermedia, 1997.

Pada masa sebelum Orde Baru, kehadiran pendidikan di sekolah-sekolah umum, baik yang negeri atau swasta, bersifat sukarela. Ini, antara lain, karena kejengkelan terhadap ateisme komunis di satu pihak, dan keinginan publik agar nilai-nilai agama juga disosialisasikan sejak dini melalui lembaga-lembaga pendidikan, sejak awal Orde Baru pendidikan agama menjadi mata pelajaran yang wajib diberikan.

Kesimpulan

Agama memiliki dua warisan. Warisan pertama adalah pencerahan, sementara warisan kedua adalah kebrutalan. Di satu sisi, agama memunculkan dan mengembangkan etika, hukum, dan gagasan-gagasan yang luhur. Seperti pemihakan kepada kaum lemah, cinta kasih, pemuliaan martabat manusia, pemaafan, dan keadilan sosial. Di sisi lain, agama menjadi kontributor utama perang, pertumpahan darah, kebencian, dan intoleransi.

Belakangan ini radikalisme agama menjadi persoalan global, dianggap sebagai pemicu aksi terorisme yang mengganggu keamanan dan kedamaian di mana-mana. Sering isu radikalisme dialamatkan pada agama Islam saja, padahal sesungguhnya radikalisme ada disemua agama.

Solusi untuk mengatasi radikalisme agama adalah melalui pendidikan dan pengajaran, yaitu dengan cara memberikan pemahaman agama yang benar, dan juga melalui pemahaman terhadap kehidupan yang pluralis.

Daftar Rujukan

- Anwar, Syafii, 1992. *"Islam, Negara, dan Formasi Sosial dalam Orde Baru : Mengungkap Dimensi Sosio-Historis Kelahiran dan Perkembangan ICMI"*, *Ulumul Qur'an*, no. 3, vol. III, suplemen.
- A. Sirry, Mun'im, 2003, *Membendung Militansi Agama*, iman dan politik dalam masyarakat modern. Jakarta : erlangga
- Adam Buyung Nasution, 1992. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia : A Socio-Legal Study of The Indonesian Konstituante 1956-1959*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,
- Dawam, M. Rahardjo, 1996. *Ensiklopedi Al-Quran : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996
- Dawam M. Raharjo.(ed.), 1997. *Keluar dari KeMelut Pendidikan Nasional: menjawab Tantangan Kualitas Sumberdaya Manusia Abad 21*, Jakarta: Intermasa,
- Geertz, Hildred, 1963. *"Indonesian Cultures and Communities"*, dalam Ruth McVey (ed), *Indonesia*, New Haven : Southeast Asia Studies, Yale University.
- Jay, Robert, *"Santri and Abangan: Religious Schism in Rural Central Java"*, Harvard University, 1957. Lihat juga tulisannya *"History and Personal Experience: Religious and Political Conflict in Java"*, dalam Robert F. Spencer (ed), *Religion and Change in Contemporary Asia*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971.
- Jay, Robert, 1963, *Religion and politics in rural central java, nex haven : southeast asia studies*, Yale University
- Jose Casanova, 1994. *Public Religions In The Modern World*, Chicago and London : The University of Chicago Press., 1994, h. 4.
- Niel, Robert Van, 1960. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, The Hague : W. Van Hoeve, Ltd. Prisma edisi *"Mencari Kiblat Pendidikan"*, no. 7, Juli 1980

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI), Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, \”Sosial Mobilization and Political Development\”;
Daniel Lerner, *The Passing of Traditional Society in the Middle East.*